

POTENSI SEKTOR PERTANIAN DI JAWA TENGAH

(The Agriculture Sector Potentials in Central Java Province)

Efriyani Sumastuti

ABSTRACT

The study analyses: 1) the agriculture sector income distribution at district and city levels in Central Java Province; 2) agriculture sector potentials at district and city levels in Central Java Province. The study utilizes time series data from 2005 to 2009 (five years). The result shows that there is a fair income distribution in agriculture sector among the district and city levels in Central Java, revealed by the Williamson index of less than 0.05. Amongst the 29 districts in Central Java, 65% (19 districts) have promising potentials in agriculture sector.

Keywords: potentials, agriculture sector, income distribution

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan perubahan yang terencana dari situasional yang satu ke situasional yang lain yang dinilai lebih baik atau adanya proses perubahan menuju kehidupan yang lebih baik (Supriatna, 2000).

Untuk meningkatkan peluang dan potensi daerah dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan semakin meratanya distribusi pendapatan, perlu dicari potensi yang spesifik masing-masing daerah. Apabila potensi tersebut sudah diketahui, maka perlu didorong dan dikembangkan untuk menjadi sektor yang diandalkan. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat

dipercepat tanpa mengorbankan pemerataan distribusi pendapatan.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, perhatian terfokus pada dualisme antara pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Kedua hal tersebut sama pentingnya, tetapi sulit untuk diwujudkan secara bersamaan. Pengutamaan yang satu akan mengakibatkan yang lain terkorbankan.

Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 3,25 juta hektar yang terdiri dari lahan sawah 995 ribu hektar (30,6 %) dan lahan bukan sawah 2,26 juta hektar (69,4 %). Lahan bukan sawah merupakan lahan kering, yang digunakan untuk bangunan/pekarangan, tegal, perkebunan, hutan, rawa, kolam dan sebagainya. Sebagian besar penduduk Jawa

Tengah (sekitar 51 %) bekerja di sektor pertanian (Anonim, 2008).

Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 5,59 % dan kontribusi sektor pertanian adalah 2,78 % (BPS, 2007). Apabila dibandingkan dengan sektor lain, sektor pertanian mempunyai kontribusi yang relatif kecil, sedangkan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan latar belakang dan mendukung kebijakan Gubernur Jawa Tengah mengenai “Bali Ndeso Mbangun Deso”, maka perlu dianalisis bagaimana distribusi pendapatan sektor pertanian Kabupaten/ Kota se Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu perlu juga dianalisis potensi Kabupaten/ Kota di sektor pertanian, sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemerataan pendapatan sektor pertanian antar Kabupaten dan Kota serta potensi sektor pertanian Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan merupakan tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik. Proses pembangunan harus mampu membawa manusia melampaui pengutamaan materi dan aspek-aspek keuangan dari kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang

multidimensional, dengan melibatkan segenap pengorganisasian dan meninjau kembali sistem ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan, salah satu cara adalah dengan melihat ada tidaknya peningkatan pendapatan dan output. Untuk keperluan tersebut, maka pembangunan tidak dapat dipisahkan secara tegas dengan pertumbuhan.

Menurut Todaro (2000), ada empat pendekatan dalam pembahasan tentang pembangunan ekonomi setelah perang dunia kedua, yaitu :

1. Model pertumbuhan bertahap linier

Model ini dikemukakan oleh Rostow yang menyatakan bahwa setiap masyarakat pasti terletak dalam salah satu dari lima tahapan ekonomi yang ada. Kelima tahapan ekonomi tersebut adalah tahapan masyarakat tradisional, penyusunan kerangka dasar, tinggal landas, kematangan ekonomi dan konsumsi massal yang tinggi. Salah satu cara untuk mencapai tahapan tinggal landas adalah dengan pengalangan dana tabungan. Dana tersebut digunakan untuk memacu investasi agar laju pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat.

2. Model perubahan struktural

Model perubahan struktural memusatkan perhatian pada mekanisme yang memungkinkan adanya transformasi struktur perekonomian. Transformasi tersebut

merupakan perubahan dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional menjadi perekonomian yang lebih modern. Perekonomian yang lebih modern ditandai dengan kehidupan yang berorientasi pada perkotaan, kehidupan yang lebih bervariasi serta memiliki sektor industri manufaktur dan jasa yang tangguh. Dalam analisis, model ini menggunakan konsep harga dan alokasi sumber daya, serta metode ekonometri untuk menjelaskan terjadinya proses transformasi.

3. Model revolusi ketergantungan internasional

Model ketergantungan internasional menyatakan bahwa negara dunia ketiga merupakan korban kekakuan aneka faktor kelembagaan, politik dan ekonomi. Negara dunia ketiga terjebak kedalam perangkap ketergantungan dan dominasi negara kaya. Oleh karena itu perlu didorong untuk dapat lebih mandiri dan independen.

4. Model kontraevolusi neoklasik

Model ini menegaskan bahwa keterbelakangan negara berkembang berasal dari buruknya alokasi sumber daya yang bertumpu pada kebijakan pengaturan harga yang tidak tepat serta adanya campur tangan pemerintah yang berlebihan. Pertumbuhan merupakan salah satu tolok ukur untuk mengetahui maju tidaknya perekonomian di suatu negara. Pertumbuhan didefinisikan sebagai ukuran fisik yang berupa peningkatan

produksi barang dan jasa. Menurut Suparmoko (1994), alat pengukur pertumbuhan antara lain dengan : (1) Produk domestik bruto (PDB). PDB merupakan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam satu tahun dinyatakan dalam harga pasar. (2) Pendapatan per kapita atau PDB per kapita. PDB per kapita adalah jumlah PDB dibagi dengan jumlah penduduk. PDB tidak mencerminkan kesejahteraan ekonomi yang sesungguhnya di suatu negara, sebab angka PDB yang tinggi belum tentu diterima secara merata oleh seluruh penduduk. (3) Pendapatan per jam. Pendapatan per jam kerja merupakan salah satu alat ukur maju tidaknya suatu perekonomian. Pada umumnya, untuk jenis pekerjaan yang sama, upah per jam kerja negara maju lebih besar. (4) Harapan hidup waktu lahir. Harapan hidup waktu lahir dapat digunakan untuk melihat kemajuan dan kesejahteraan suatu perekonomian. Secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari kemampuan seseorang untuk memenuhi semua kebutuhan barang dan jasa, termasuk kesehatan. (5) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk domestik bruto (PDB) merupakan hasil semua kegiatan yang dikerjakan di dalam negeri, termasuk kegiatan orang asing di suatu negara. PDB digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik (investasi) dan ekspor

neto. PDRB sama dengan PDB tetapi pada wilayah yang lebih sempit (propinsi dan Kabupaten/ Kota). PDRB Jawa Tengah dibedakan menjadi dua didasarkan pada permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, PDRB digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa. Dari sisi penawaran, PDRB dibedakan menurut lapangan usaha, yang meliputi sektor pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa.

Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan unsur penting yang harus diperhatikan untuk mengetahui tinggi rendahnya kesejahteraan suatu bangsa. Ukuran distribusi pendapatan dibedakan menjadi :

1. Ukuran distribusi

Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga. Untuk analisis statistik digunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk penerima pendapatan

tertentu dari total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh dari total pendapatan dalam periode waktu tertentu. Untuk mengetahui ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan, dilakukan perhitungan koefisien Gini. Angka koefisien Gini berkisar antara nol hingga satu. Pada kenyataannya, negara yang distribusi pendapatannya relatif merata mempunyai angka koefisien Gini sebesar 0,20 sampai 0,35; sedang negara dengan distribusi pendapatan kurang merata angkanya berkisar antara 0,50 hingga 0,70 (Todaro, 2000).

2. Distribusi fungsional

Distribusi fungsional lebih terfokus pada bagian pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi. Teori ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkan dengan persentase total penapatan yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan banyak diperdebatkan. Sebab apabila suatu negara menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada umumnya hasil tersebut tidak dapat dinikmati oleh semua masyarakat secara merata. Sebaliknya apabila distribusi pendapatan yang diutamakan, pertumbuhan ekonomi tidak secepat yang diharapkan. Dengan demikian perlu dicari upaya agar kedua hal tersebut dapat berjalan bersamaan.

Menurut Todaro (2000), terdapat dua argumen yang berkaitan dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, yaitu:

a. Argumen tradisional

Sebagian teori yang ada menyatakan bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat.

Argumen dasarnya adalah ketimpangan pendapatan merupakan kondisi sementara yang tidak terelakkan. Ketimpangan tersebut sebagai akibat dari akumulasi pendapatan perorangan dan perusahaan yang tinggi. Akumulasi dimaksudkan untuk membentuk formasi modal yang kuat guna merangsang investasi dan pertumbuhan. Apabila hal tersebut terus berlangsung, maka akan tercipta pendapatan nasional serta pendapatan per kapita yang tinggi, sehingga dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program perpajakan dan subsidi. Tetapi usaha pendistribusian kembali pendapatan akan mengakibatkan laju pertumbuhan menurun. Karena turunnya laju pertumbuhan dianggap sebagai hal yang negatif, maka pendistribusian kembali terpaksa ditunda. Dengan demikian akan terjadi penundaan terus menerus dan ketimpangan distribusi pendapatan terus akan berlangsung.

b. Argumen tandingan

Argumen tandingan berpendapat bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil tidak dapat dinomor duakan. Sebab hal tersebut merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Alasannya:

- 1). Ketimpangan yang besar dan kemiskinan telah menciptakan masyarakat miskin tidak mempunyai akses terhadap perolehan kredit. Masyarakat ini juga tidak dapat membiayai pendidikan anak, tidak punya peluang investasi secara fisik maupun keuangan serta memilih banyak anak sebagai sumber jaminan di hari tua. Faktor-faktor tersebut secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan.
 - 2). Di negara dunia ketiga, orang kaya tidak dapat diharapkan kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modal dalam perekonomian domestik.
 - 3). Pendapatan, taraf hidup dan produktivitas kaum miskin rendah, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menjadi rendah
 - 4). Untuk meningkatkan tabungan dan investasi domestik guna mempercepat pertumbuhan, maka perlu peningkatan pendapatan penduduk miskin. Sebab kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang produksi.
-

5). Distribusi pendapatan yang kurang adil akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan studi pustaka/literatur sebagai obyek kajian. Literatur pada hakekatnya merupakan hasil olah budi manusia dalam bentuk karya tulis guna menuangkan gagasan/ pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang. Penelitian terhadap literatur bukan berarti melakukan penelitian terhadap buku semata, tetapi lebih ditekankan kepada esensi yang terkandung dalam buku tersebut (Subiyanto, 1987).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi : PDRB atas harga konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2007; PDRB atas harga konstan 2000 untuk wilayah Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2007; jumlah penduduk Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 – 2007.

Untuk menganalisis pemerataan pendapatan sektor pertanian digunakan metode indeks Williamson (Wulandari,2001) sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sum (Y_i - Y) \frac{f_i}{n}}{Y}$$

IW = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan per kapita sektor Pertanian Kabupaten/ Kota

Y = Pendapatan per kapita sektor Pertanian Provinsi Jawa Tengah

f_i = Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah

N = Jumlah penduduk Kabupaten/ Kota

Untuk menganalisis potensi daerah yang perlu untuk dikembangkan dilakukan perhitungan *Location Quotient* (Kafelbang, 2002) sebagai berikut :

$$LQ = \frac{\frac{S_{i dj}}{Y_{dj}}}{\frac{S_{ip}}{Y_p}} = \frac{S_{i dj} Y_p}{Y_{dj} S_{ip}}$$

LQ = *Location Quotient*

Y_{dj} = PDRB Kabupaten/Kota j

S_{idj} = Nilai tambah sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten/ Kota j

Y_p = PDRB Jawa Tengah

S_{ip} = Nilai tambah Kabupaten/Kota terhadap PDRB Jawa Tengah

PEMBAHASAN

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sangat berfluktuasi. Tantangan perekonomian yang berat akibat gejolak ekonomi dan moneter pada tahun 1997, membawa pengaruh buruk bagi kondisi perekonomian Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi turun dari 7,3% menjadi 3,03 %. Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi minus 11,74%. Mulai tahun 1999 sampai dengan 2007 pertumbuhan

ekonomi Jawa Tengah menunjukkan perbaikan, yaitu antara 3 sampai 5% setiap

Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota. Luas Wilayah Jawa Tengah pada tahun 2008 tercatat sebesar 3,25 juta Ha atau sekitar 25,04% Pulau Jawa. Luas yang ada terdiri dari 0,99 juta Ha (30,60%) lahan sawah dan 2,26 juta Ha (69,40%) lahan bukan sawah. Luas lahan yang digunakan

tahun (BPS, 2007).

untuk tanaman pangan dan hortikultura 1,7 juta Ha, yang terdiri dari lahan sawah 995,5 ribu Ha dan lahan kering 763,3 ribu Ha (Anonim, 2008). Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar beririgasi teknis (38,26 persen), sisanya beririgasi setengah teknis, tadah hujan dan lain-lain. Produksi, penyediaan dan kebutuhan pangan di Jawa Tengah pada tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Produksi, Penyediaan dan Kebutuhan Pangan Jawa Tengah 2006 (ton)

No	Komoditas	Produksi	Penyediaan	Kebutuhan	Plus/Minus
1	Padi	8.503.523	4.472.431	3.651.773	820.658
2	Jagung	1.505.706	1.204.565	529.563	675.002
3	Kedelai	117.068	106.532	339.998	-233.466
4	Daging	553.021	553.021	176.658	376.363
5	Telur	121.196	121.196	101.118	20.078
6	Ikan	367.431	367.431	555.886	- 188.455
7	Susu	801.29	801.29	99.596	- 194.67
8	Gula	218.070	218.070	238.911	-20.842

Sumber: BBMKP Jawa Tengah (2006), diolah

Keterangan Kebutuhan Konsumsi :

Beras : 113,85 kg/kap/tahun

Jagung : 16,51 kg/kap/tahun

Kedelai : 10.60 kg/kap/tahun

Konversi dari GKG ke beras : 63,20%

Susut beras : 16,78%

Susut jagung : 20%

Susut kedelai : 9%

Profil sektor pertanian secara luas di Jawa Tengah dibedakan menjadi beberapa sub sektor, yaitu :

1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan yang ada dan diproduksi di Jawa Tengah meliputi padi,

palawija, sayuran dan buah-buahan. Di semua kabupaten/Kota terdapat tanaman padi dengan luas panen dan produktivitas yang bervariasi. Secara umum, produktivitas tanaman pangan (padi, palawija, sayur dan buah) pada tahun 2008

mengalami peningkatan dibandingkan beberapa komoditas tanaman pangan tahun 2007. Luas panen dan produktivitas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Panen dan Produktivitas Beberapa Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2008

Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (ku/Ha)
Padi	1.659.314	55,06
Jagung	639.354	41,92
Ketela	191.053	164,32
Kacang tanah	135,3	12,36
Kedele	111,65	14,96

Sumber : BPS (2009)

2. Perkebunan

Tanaman perkebunan yang ada di Jawa Tengah, berdasarkan pada pengelolanya dibedakan menjadi perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Luas dan produksi tanaman perkebunan

dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, terutama untuk komoditas karet, teh, cengkeh, kelapa, tebu, kapok, kopi, tembakau, jambu mete dan nilam, seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Luas dan Produksi beberapa Tanaman Perkebunan

Komoditas	Luas tanaman (Ha)	Produksi (ton)
Kelapa	253.268,16	395.792,64
Karet	2.597,46	732,35
Teh	5.156,43	5.579,95
Cengkeh	34.642,6	5.869,27
Tebu	60.615,98	272.007,97
Kapok	43.469,83	39.570,08
Kopi	35.004,67	14.292,31
Tembakau	36.778,31	25.331,2
Jambu mete	26.364,85	8.537,49
Nilam	3.785,03	12.464,29

Sumber : BPS (2009) diolah

3. Peternakan

Jenis ternak yang diusahakan di Jawa Tengah terdiri dari: ternak besar, ternak kecil

dan unggas. Produksi hasil ternak secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Produksi Hasil Ternak Tahun 2008

Komoditas	Produksi
1. Telur (kg)	
a. Ayam ras	127.560.512
b. Ayam kampung	29.575.196
c. Itik	25.050.605
d. Burung puyuh	9.169.290
2. Susu sapi & kambing (l)	89.916.259
3. Kulit (lembar)	
a. Sapi/kerbau	255.872
b. Kambing/domba	1.128.589
4. Daging (kg)	
a. Sapi	
b. Kerbau	45.735.802
c. Kuda	2.701.664
d. Babi	2.304
e. Kambing	2.090.373
f. Domba	9.654.753
g. Ayam ras	6.066.603
h. Ayam kampung	77.868.000
i. Itik	36.067.550
	3.029.238

Sumber : BPS (2009) diolah

4. Perikanan

Kegiatan Sub sektor perikanan di Jawa Tengah meliputi perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut terdiri dari budidaya dan penangkapan, sedangkan perikanan darat meliputi budidaya tambak, kolam, karamba dan sawah serta perairan umum. Produksi perikanan di Jawa Tengah seperti pada Tabel 5

5. Kehutanan

Menurut fungsinya, hutan di Jawa Tengah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : hutan wisata, hutan lindung dan hutan produksi. Luas masing-masing hutan tersebut di atas seperti pada Tabel 6.

Tabel 5. Produksi Perikanan di Jawa Tengah

Jenis Perikanan	Produksi (ton)
1. Perikanan laut	
a. Budidaya	2.249
b. Penangkapan	174.587,9
2. Perikanan darat	
a. Budidaya	126.457,2
b. Perairan umum	17.536,8

Sumber : BPS (2009)

Tabel 6. Luas Hutan di Jawa Tengah

Jenis hutan	Luas (Ha)
Hutan produksi	551.245,37
Hutan lindung	77.724,94
Hutan wisata	7.382,56

Sumber : BPS (2009)

Pemerataan Pendapatan Sektor Pertanian di Jawa Tengah

Pendapatan nasional/regional dapat diumpamakan sebagai kue. Apabila kue tersebut dapat dibagikan secara merata kepada seluruh penduduk di suatu Wilayah, maka dikatakan bahwa distribusi pendapatannya merata. Sebaliknya, apabila pembagian tidak merata (berfluktuasi, ada yang kecil, sedang dan besar), maka dikatakan ada ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2007). Pada kenyataannya, besarnya pendapatan seseorang di lingkungannya tidak mungkin sama persis dan merata. Sebab pendapatan seseorang

ditentukan oleh banyak faktor, antara lain kondisi sosial, ekonomi, budaya dan bagaimana seseorang memandang dan menyikapi hidup.

Untuk mengukur kesenjangan distribusi pendapatan digunakan indeks Williamson. Apabila nilai indeks mendekati nol maka tingkat kesenjangan distribusi pendapatan semakin kecil (semakin merata). Sebaliknya, apabila nilai indeks semakin jauh dari nol, maka kesenjangan semakin lebar. Besarnya indeks Williamson Antar Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Indeks Williamson Antar Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah

Tahun	Indeks Williamson	
	Harga berlaku	Harga konstan
2003	0,70	0,65
2004	0,72	0,66
2005	0,74	0,67
2006	0,73	0,67
2007	0,73	0,67
Rerata	0,72	0,66

Sumber : BPS (2007)

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa selama kurun waktu 5 tahun (2003 – 2007), distribusi pendapatan di Provinsi Jawa Tengah belum merata. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson yang jauh dari nol (rata-rata 0,72 dan 0,66). Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi antara Kabupaten/ Kota yang satu dengan yang lain. Kesenjangan pendapatan di Jawa

Tengah tidak hanya terjadi antar Kabupaten/Kota, tetapi juga terjadi antar sektor ekonomi, seperti pada Tabel 8

Tabel 8. Indeks Williamson Antar Sektor Ekonomi Di Jawa Tengah

Tahun	Indeks Williamson	
	Harga berlaku	Harga konstan
2003	0,62	0,58
2004	0,64	0,59
2005	0,69	0,63
2006	0,66	0,62
2007	0,59	0,57
Rerata	0,64	0,60

Sumber : BPS (2007)

Apabila dilihat khusus untuk sektor pertanian, maka nilai indeks Williamson di bawah 0,1. Hal tersebut terjadi baik di Kabupaten maupun Kota. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerataan pendapatan di sektor pertanian relative merata. Untuk lebih jelasnya, nilai indeks Williamson untuk Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10.

Dari Tabel 9 dan 10 diketahui bahwa nilai indeks Williamson antara Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tidak banyak berbeda. Dengan nilai indeks Williamson tersebut dapat dikatakan bahwa di sektor pertanian, pendapatan lebih merata. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain adalah : rata-rata kepemilikan lahan di sektor pertanian hampir sama, dalam pengelolaan produksi, khususnya penggunaan input produksi tertentu dan pemeliharaan ada subsidi dari

pemerintah serta harga input dan output di Jawa Tengah relatif homogen.

Tabel 9. Nilai Indeks Williamson (IW) Kabupaten

Kabupaten	IW
Cilacap	0,035
Banyumas	0,02
Purbalingga	0,003
Banjarnegara	0,003
Kebumen	0,008
Purworejo	0,006
Wonosobo	0,002
Magelang	0,003
Boyolali	0,011
Klaten	0,002
Sukoharjo	0,002
Wonogiri	0,012
Karanganyar	0,004
Sragen	0,001
Grobogan	0,005
Blora	0,006
Rembang	0,011
Pati	0,004
Kudus	0,013
Jepara	0,007
Demak	0,003
Semarang	0,008
Temanggung	0,0004
Kendal	0,004
Batang	0,003
Pekalongan	0,007
Pemalang	0,018
Tegal	0,026
Brebes	0,026

Sumber : BPS (2009)

Tabel 9 menunjukkan bahwa indeks Williamson terendah ada di Kabupaten Sragen (0,001) dan tertinggi di Kabupaten Cilacap (0,035). Di sektor pertanian, Kabupaten Sragen mempunyai distribusi

pendapatan yang lebih merata dibandingkan dengan Kabupaten yang lain. Sementara itu, Kabupaten Cilacap mempunyai distribusi pendapatan di sektor pertanian yang kurang merata dibandingkan dengan Kabupaten lain. Adanya kesenjangan distribusi pendapatan di sektor pertanian disebabkan oleh banyak hal, antara lain adalah : adanya perbedaan potensi daerah masing-masing, kebijakan pemerintah daerah karena otonomi daerah dan budaya lokal.

Tabel 10 menunjukkan bahwa di Wilayah Kota, distribusi pendapatan sektor pertanian yang lebih merata di Kota Magelang dan Kabupaten Pekalongan (0,003), sedangkan yang kurang merata ada di Kota Semarang (0,04).

Tabel 10. Nilai Indeks Williamson (IW) Kota

Kota	IW
Magelang	0,003
Surakarta	0,016
Salatiga	0,004
Semarang	0,040
Pekalongan	0,003
Tegal	0,004

Sumber : BPS (2009)

Potensi Sektor Pertanian di Jawa Tengah

Untuk menentukan potensi spesialisasi suatu daerah terhadap aktivitas ekonomi utama atau untuk menentukan sektor unggulan digunakan pendekatan LQ (*Location Quotient*). Pendekatan ini

menggambarkan potensi sektor ekonomi yang didasarkan pada besar kecilnya nilai tambah PDRB di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Besarnya LQ sektor pertanian untuk masing-masing Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 11.

Berdasarkan Tabel 11 diketahui bahwa diantara 29 Kabupaten dan 6 Kota di Jawa Tengah, tidak ada Kota yang mempunyai potensi sektor pertanian sedangkan untuk Kabupaten terdapat 19 yang mempunyai potensi pengembangan sektor pertanian.

Secara umum tingginya LQ sektor pertanian di 19 Kabupaten didominasi oleh besarnya nilai tambah bruto sub sektor tanaman bahan makanan. Tetapi ada daerah tertentu yang berasal dari sub sektor perkebunan, peternakan atau perikanan. Dari 19 Kabupaten yang mempunyai potensi di sektor pertanian, Kabupaten Brebes mempunyai nilai LQ tertinggi (2,52). Hal ini terjadi karena Kabupaten Brebes merupakan sentra komoditas bawang merah, di samping potensial untuk tanaman perkebunan dan kehutanan. LQ terendah adalah Kabupaten Banyumas (1,06). Untuk lebih rinci, LQ sub sektor tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan untuk 19 Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 11. Indek LQ Sektor Pertanian Di Jawa Tengah

No	Kabupate/Kota	LQ
	Kabupaten	
1.	Cilacap	0,79
2.	Banyumas	1,06
3.	Purbalingga	1,54
4.	Banjarnegara	1,87
5.	Kebumen	1,60
6.	Purworejo	1,59
7.	Wonosobo	2,16
8.	Magelang	1,39
9.	Boyolali	1,58
10.	Klaten	0,93
11.	Sukoharjo	0,93
12.	Wonogiri	2,31
13.	Karanganyar	1,00
14.	Sragen	1,64
15.	Grobogan	2,01
16.	Blora	2,48
17.	Rembang	2,15
18.	Pati	1,63
19.	Kudus	0,11
20.	Jepara	1,05
21.	Demak	2,08
22.	Semarang	0,68
23.	Temanggung	1,46
24.	Kendal	1,15
25.	Batang	1,34
26.	Pekalongan	0,95
27.	Pemalang	1,23
28.	Tegal	0,69
29.	Brebes	2,52
	Kota	
30.	Magelang	0,16
31.	Surakarta	0,00
32.	Salatiga	0,26
33.	Semarang	0,06
34.	Pekalongan	0,39
35.	Tegal	0,42

Sumber : BPS (2007)

Tabel 12. LQ Sub Sektor Pertanian

no	Kab/Kota	LQ	LQ TBM	LQ Kbn	LQ Ternk	LQ Hut	LQ Ikan
1	Banyumas	1,06	1,04	1,04	1,22	2,24	0,98
2	Purbalingga	1,54	1,54	1,54	2,07	2,39	1,27
3	Banjarnegara	1,87	2,32	2,32	0,66	2,33	0,79
4	Kebumen	1,60	1,87	1,87	1,32	3,04	0,76
5	Purworejo	1,59	1,69	1,69	1,27	4,37	1,01
6	Wonosobo	2,16	2,5	2,5	2,74	8,46	0,74
7	Magelang	1,39	1,57	1,57	1,27	4,29	0,5
8	Boyolali	1,58	1,59	1,59	3,83	1,04	0,41
9	Wonogiri	2,31	3,08	3,08	1,18	0,11	0,21
10	Sragen	1,64	2,03	2,03	1,07	0,93	0,77
11	Grobogan	2,01	2,58	2,58	0,97	3,04	0,13
12	Blora	2,48	2,36	2,36	1,01	39,6	0,09
13	Rembang	2,15	2,4	2,4	1,29	5,7	5,02
14	Pati	1,63	1,56	1,56	0,91	1,38	4,64
15	Demak	2,08	2,41	2,41	0,85	0,04	4,33
16	Temanggung	1,46	1,56	1,56	1,71	1,65	0,23
17	Batang	1,34	1,1	1,1	1,36	2,08	1,99
18	Pemalang	1,23	1,26	1,26	1,08	0,19	1,3
19	Brebes	2,52	3,05	3,05	1,9	9,28	2,68

Sumber : BPS (2007 dan 2009) diolah

Catatan : data didasarkan pada PDRB harga konstan tahun 2000

Dari Tabel 12 diketahui bahwa masing-masing Kabupaten mempunyai potensi sub sektor pertanian yang berbeda. Potensi Kabupaten berdasarkan sub sektor pertanian adalah :

1. Sub sektor tanaman bahan makanan (TBM)

Untuk sub sektor tanaman bahan makanan, daerah yang berpotensi meliputi Kabupaten : Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Demak, Temanggung, Pemalang dan Brebes.

2. Sub sektor tanaman perkebunan

Untuk sub sektor perkebunan, daerah yang berpotensi meliputi Kabupaten : Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Demak, Temanggung, Pemalang dan Brebes.

3. Sub sektor Peternakan

Untuk sub sektor peternakan, daerah yang berpotensi meliputi Kabupaten : Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Rembang, Temanggung dan Brebes.

4. Sub sektor kehutanan

Untuk sub sektor kehutanan, daerah yang berpotensi meliputi Kabupaten : Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Temanggung dan Brebes.

5. Sub sektor perikanan

Untuk sub sektor perikanan, daerah yang berpotensi meliputi Kabupaten : Purbalingga, Rembang, Pati, Demak, Batang, Pemalang dan Brebes.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Pemerataan pendapatan sektor pertanian antar Kabupaten dan Kota di Provinsi

Jawa Tengah relatif merata. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks Williamson kurang dari 0,05.

2. Potensi sektor pertanian berada di Wilayah Kabupaten. Di Jawa Tengah, dari 29 Kabupaten yang ada, 65 % (19 Kabupaten) mempunyai potensi sektor pertanian.
3. Potensi sub sektor pertanian antar Kabupaten yang berpotensi pertanian berbeda-beda, tergantung pada kondisi dan lingkungan masing-masing daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2008. *Pembangunan Pertanian Jawa Tengah*. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah.
- BPS, 2007. *Tinjauan PDRB Kabupaten/ Kota se- Jawa Tengah*. Semarang
- , 2007. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah*. Semarang.
- , 2009. *Jawa Tengah Dalam Angka*. Semarang.
- Kafelbang Ruth Lusiana, 2002. *Analisis Distribusi Pendapatan Di Nusa Tenggara Timur*. Skripsi S1 tidak dipublikasikan, UNDIP, Semarang.
- Subiyanto Ibnu, 1987. *Metodologi Penelitian (Manajemen dan Akuntansi)*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Suparmoko, 1994. *Pengantar Ekonomika Makro*. Edisi ketiga, BPFE, Yogyakarta.

Todaro MP, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ketujuh, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Supriatna Tjahya, 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. PT Rineka Cipta, Jakarta.

Wulandari Ika, 2001. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Grobogan*. Skripsi S1 tidak dipublikasikan, UNDIP, Semarang.